

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI DESA RAWA MAKMUR
KECAMATAN KOLANG KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

OLEH:

YUSNITA MARBUN
218520021



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)24/12/25

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI DESA RAWA MAKMUR
KECAMATAN KOLANG KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

OLEH:

**YUSNITA MARBUN
218520021**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)24/12/25

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : YUSNITA MARBUN

NPM : 218520021

JUDUL : PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI KELOMPOK TANI DI
DESA RAWA MAKMUR KECAMATAN
KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol

Mengetahui :

Dekan



Dr. Wahid Mustafa, S. Sos, M.I.P

Ka. Prodi



Dr. Dedyendra Muda, M.AP

Tanggal Lulus : 10 September 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2025



Yusnita Marbun
Npm. 218520021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

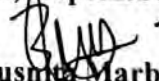
Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusnita Marbun
Npm : 218520021
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area. **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Di Bawah Umur Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur) “ beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan/media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebelumnya.

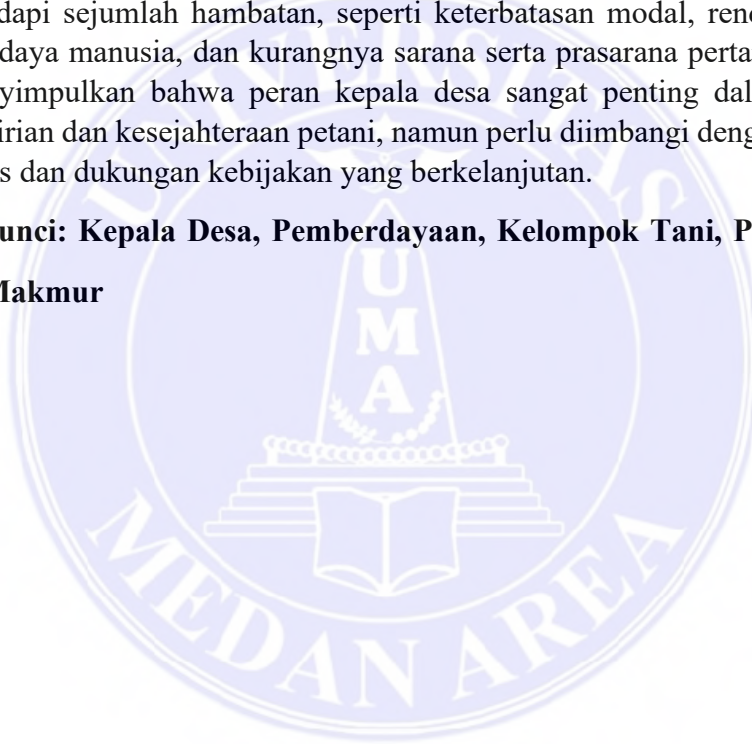
Medan, September 2025


Yusnita Marbun
NPM. 218520021

ABSTRAK

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai organisator, fasilitator, dan inovator dalam upaya meningkatkan kapasitas kelompok tani. Kepala desa memfasilitasi pembentukan kelompok tani, penyuluhan, pelatihan pertanian, serta menjalin kerja sama dalam penyediaan pupuk hingga bibit tanaman. Namun, pemberdayaan kelompok tani masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana serta prasarana pertanian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepala desa sangat penting dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan petani, namun perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

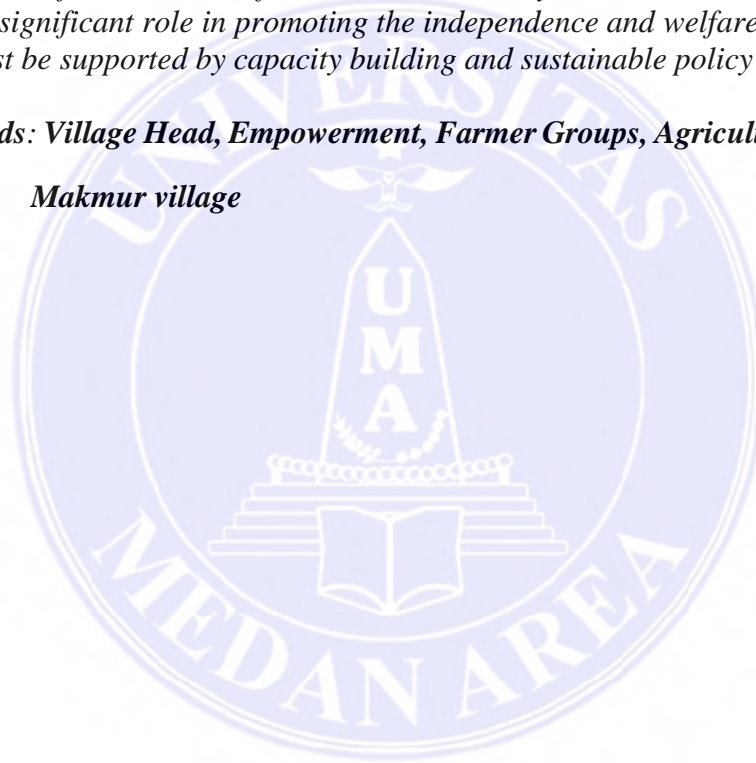
Kata Kunci: Kepala Desa, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pertanian, Desa Rawa Makmur



ABSTRACT

This study aims to examine the role of the village head in empowering farmer groups in Rawa Makmur Village, Kolang Subdistrict, Central Tapanuli Regency, as well as to identify the inhibiting factors in the empowerment process. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the village head plays a crucial role as an organizer, facilitator, and innovator in efforts to enhance the capacity of farmer groups. The village head facilitates the formation of farmer groups, provides agricultural extension and training, and establishes cooperation with various stakeholders to supply agricultural tools and infrastructure. However, the empowerment process still faces several obstacles such as limited capital, low quality of human resources, and inadequate agricultural facilities and infrastructure. The study concludes that the village head plays a significant role in promoting the independence and welfare of farmers, but this must be supported by capacity building and sustainable policy support.

Keywords: *Village Head, Empowerment, Farmer Groups, Agriculture, Rawa Makmur village*



RIWAYAT HIDUP


Penulis lahir Di Sibolga pada tanggal 05 september 2003, anak dari Ayah Preddi Marbun dan ibu Artina Simatupang. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara .

Pada tahun 2021 penulis lulus dari sekolah menengah atas (SMA), pada tahun 2021 pula penulis mendaftarkan diri menjadi mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dengan program studi dministrasi Publik di Universitas Medan Area.

Selama perkuliahan penulis aktif dalam organisasi internal program studi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) sebagai Anggota Bidang Pengembangan dan Pengendalian Aspirasi Mahasiswa (PPAM).

Tahun 2024 penulis lulus dalam program kampus merdeka yaitu program kampus mengajar Batch 7 di salah satu Sekolah Menengah Pertama yang ada di kota medan.

Medan, September 2025


Yusnita Marbun
Npm.218520021

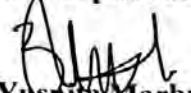
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.”** dengan baik.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Si selaku Rektor Universitas Medan Area, Bapak Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M. IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area dan juga kepada ibu khairunnisah lubis S.sos, M.Ipol selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini, dan tidak lupa Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam doa, motivasi maupun finansial kepada penulis, dan kepada teman-teman penulis yang telah membantu dan memberikan Support kepada penulis untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Besar harapan penulis bahwa Skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, September 2025

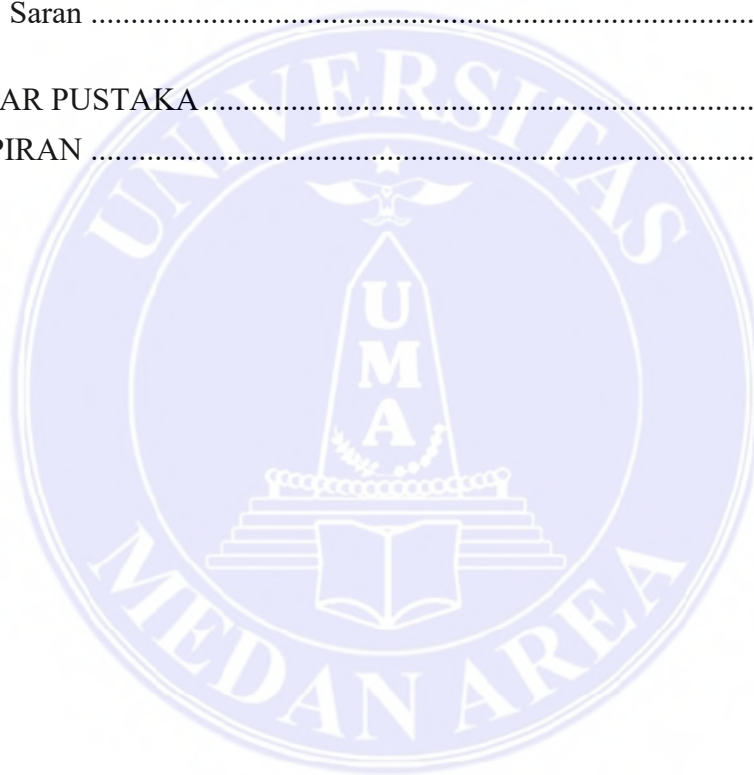

Yusnita Marbun
Npm.218520021



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	11
KATA PENGANTAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
 I PENDAHULUAN.....	 12
1.1.Latar Belakang.....	12
1.2.Rumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	10
 II TINJAUAN PUSTKA	 11
2.1.Peranan	11
2.2.Pemberdayaan.....	14
2.3.Pemberdayaan Kelompok Tani.....	16
2.4.Pemerintahan Desa	20
2.5.Peraturan Bupati Tapteng No.1 Tahun 2016	25
2.6.Penelitian Terdahulu.....	27
2.7.Kerangka Berpikir	31
 III METODE PENELITIAN	 33
3.1.Jenis Penelitian	33
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2.1. Lokasi Penelitian	34
3.2.2. Waktu Penelitian	35
3.4.Informan Penelitian	35
3.5.Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1.Observasi	37
3.5.2.Wawancara	38
3.5.3.Dokumentasi.....	38
3.5.4.Materi Audio dan Visual.....	39
3.6.Teknik Analisis Data	39

IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Penelitian.....	41
4.1.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	42
4.1.2. Keadaan Sosial dan Ekonomi	43
4.1.3. Visi dan Misi Desa.....	44
4.2. Pembahasan Penelitian	44
4.2.1. Peranan kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang	44
4.2.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani DiDesa Rawa Makmur	64
V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Dan luas Desa Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	6
Tabel 2. Jumlah Kelompok Tani Setiap Desa Di Kecamatan Kolang.....	7
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4. Susunan Waktu penelitian	35
Tabel 5. Informan Penelitian	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.. Kerangka berpikir	32
Gambar 2. Lokasi Desa Rawa Makmur	34
Gambar 3. Susunan organisasi Desa Rawa Makmur.....	42
Gambar 4. Kegiatan menerima bantuan berupa bibit dan pupuk	54
Gambar 5.Sumber Air Lahan Kelompok Tani	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sektor pertanian di Indonesia adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu penyumbang modal perekonomian nasional, antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan masyarakat, penghasil devisa negara dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian punya peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi Indonesia yang stabil baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan pertanian dapat dijadikan tolak-ukur atas kesejahteraan masyarakat (Soekartawi, 2007). Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja dan bergantung pada sektor pertanian untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembangunan di sektor pertanian, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perkembangan sektor lainnya, termasuk pembangunan ekonomi. Dengan demikian, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama para petani (Nippi, 2019).

Pemerintahan di Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung kelompok tani seperti strategi program pertanian yang fokus pada pengembangan infrastruktur pertanian dan penyuluhan. Pemberdayaan



kelompok tani di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan, hal ini dilakukan melalui berbagai yang dirancang pemerintah, seperti program penyuluhan pertanian, serta Kerjasama dengan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus. Banyak kelompok tani yang sudah bekerja sama dengan LSM dan sektor swasta untuk mendapatkan pelatihan, akses modal, dan teknologi. Kolaborasi ini mendukung pengembangan produk bernilai tambah, seperti pengolahan lahan pertanian.

Pemberdayaan dipahami sebagai distribusi kekuasaan yang adil, yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik dan kekuatan kelompok-kelompok yang lemah, serta memperluas pengaruh mereka dalam proses dan hasil pembangunan. Selain itu, pemberdayaan mendorong perubahan sosial yang memungkinkan individu yang sebelumnya kurang berdaya untuk mengembangkan daya saing dan berkontribusi sesuai dengan potensi yang mereka miliki (Nippi, 2019). Pemberdayaan kelompok tani di Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024 berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani melalui program-program inovatif. Dalam periode ini, pemerintah dan lembaga terkait meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk pelatihan keterampilan pertanian modern, penguatan kelompok tani, dan akses ke teknologi digital untuk pemasaran produk. Selain itu, perhatian juga diberikan pada penyediaan akses modal, seperti kredit usaha tani, agar petani dapat berinvestasi dalam peralatan dan bahan baku yang lebih baik. Dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti subsidi pupuk dan asuransi pertanian, semakin ditingkatkan untuk melindungi petani dari risiko dan fluktuasi harga.

Peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani sangat penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa bertugas mengorganisir dan membina kelompok tani, serta mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan pertanian. Selain itu, mereka juga berperan sebagai fasilitator dalam menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan akses pasar dan teknologi bagi para petani. Kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok tani melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta memastikan bahwa program-program pertanian menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, peran kepala desa sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian di desa.

Peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Indonesia sangat krusial dan mencakup berbagai aspek. Sebagai pemimpin dan pengelola di tingkat desa, kepala desa bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian. Pertama, kepala desa berfungsi sebagai pengorganisir yang mengajak masyarakat untuk membentuk kelompok tani. Dengan membentuk kelompok ini, petani dapat saling berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman, yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Kedua, kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan akses terhadap pelatihan dan pendidikan bagi petani. Melalui kerja sama dengan dinas pertanian dan lembaga lain, kepala desa dapat mengadakan pelatihan tentang teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan pemasaran produk pertanian. Ini membantu petani untuk meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan mereka.

Pertanian juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di desa. Banyak anggota keluarga, terlibat dalam proses bercocok tanam, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan mengurangi angka pengangguran di desa. Ketika petani berhasil meningkatkan produksi mereka, efek positifnya dapat meluas ke sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan lokal dan penyediaan layanan yang mendukung kegiatan pertanian. Dengan mengandalkan lahan pertanian, masyarakat desa dapat menanam berbagai jenis tanaman, seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, yang mencukupi kebutuhan gizi mereka sekaligus menjadi komoditas untuk dijual di pasar. Secara keseluruhan, pertanian di desa bukan hanya sekadar usaha ekonomi, tetapi juga merupakan fondasi kehidupan masyarakat. Ia memberikan pangan, pendapatan, pekerjaan, dan memperkuat jaringan sosial, sehingga berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Sumatera Utara melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu langkah penting adalah menyediakan program penyuluhan pertanian dengan tenaga penyuluh terlatih yang memberikan informasi dan bimbingan langsung kepada petani mengenai praktik pertanian yang baik dan teknologi terbaru. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sarana dan prasarana, termasuk alat dan mesin pertanian, bibit unggul, serta pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan akses untuk mendukung kegiatan pertanian. Untuk membantu petani dalam modal usaha, pemerintah menawarkan akses pembiayaan melalui lembaga

keuangan dengan program kredit yang memiliki bunga rendah. Pelatihan dan pendidikan juga menjadi fokus, dengan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan petani dalam pengelolaan usaha tani dan pemasaran. Pengembangan kelembagaan mendorong pembentukan kelompok tani agar petani dapat saling mendukung dan meningkatkan daya tawar mereka dipasar.

Pemerintah mendorong diversifikasi usaha pertanian agar petani tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman, sehingga resiko kerugian dapat diminimalkan. Pemasaran produk pertanian juga difasilitasi melalui pameran dan kerjasama dengan perusahaan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkaupasar yang lebih luas. kebijakan pertanian berkelanjutan dikembangkan untuk mendukung praktik yang ramah lingkungan, sehingga tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Melalui berbagai inisiatif ini, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kelompok tani di Sumatera Utara.

Tabel 1 Jumlah Dan luas Desa Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kecamatan	Jumlah	Desa Luas
1.	Pinang Sori	10 Desa	78,32 Km
2.	Badiri	9 Desa	129,49 km
4.	Lumut	6 Desa	105,98 km
5.	Sukabangun	6 Desa	49,37 km
6.	Pandan	22 Desa	34,31 km
7.	Tukkan	9 Desa	150,93 km
8.	Sarudik	5 Desa	25,92 km
9.	Tapian nauli	9 Desa	83,01 km
10.	Sitahuis	6 Desa	50,52 km
11.	Kolang	14 Desa	436,29 km
12.	Sorkam	21 Desa	80,61 km
13.	Sorkam barat	12 Desa	44,58 km
14.	Pasraibu tobing	9 Desa	103,36 km
15.	Barus	13 Desa	21,81 km
16.	Sosor gadong	9 Desa	143,13 km
17.	Andam dewi	14 Desa	122,13 km
18.	Barus utara	6 Desa	63,02 km
19.	Manduamas	20 Desa	99,55 km
20.	Sirandorung	8 Desa	87,72 km

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Data yang telah tertera diatas menyatakan bahwa kecamatan kolang memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Jumlah kelompok tani di kabupaten tapanuli tengah terdapat sebanyak 762 kelompok maka dibutuhkan anggota penyuluhan yang cukup untuk mendukung dan meningkatkan pengetahuan masyarakat kelompok tani terhadap pertanian. Pemerintah Tapanuli Tengah telah berusaha keras untuk mendukung kegiatan kelompok tani dengan berbagai cara. Mereka menyediakan program bantuan seperti penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknik pertanian modern. Dengan semakin modernnya alat dan mesin pertanian, kehadiran penyuluhan pertanian menjadi sangat penting. Terdapat beberapa kelompok tani yang telah menerima alat dan mesin modern

untuk menunjang proses kegiatan kelompok tani di tapanuli tengah.

Desa Rawa Makmur memiliki 5 kelompok tani dengan jumlah 114 anggota. Masyarakat didesa ini umumnya menanam berbagai jenis tanaman seperti cabe, jagung, asam, jeruk, rambutan, kacang, dan sayur-sayuran. Namun di desa ini tanaman yang memiliki hasil panen paling pesat diantara semua tanaman adalah jeruk. Hasil panen ini biasanya digunakan masyarakat sebagai sumber mata pencahariaan masyarakat, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Tabel 2. Jumlah Kelompok Tani Setiap Desa Di Kecamatan Kolang

No	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Hudopa nauli	3 Kelompok	79 Anggota
2.	Hurling Muara nauli	4 Kelompok	161 Anggota
3.	Makarti nauli	5 Kelompok	208 Anggota
4.	Pargaringan	7 Kelompok	183 Anggota
5.	Satahi nauli	9 Kelompok	3.196 Anggota
6.	Rawa Makmur	5 Kelompok	114 Anggota
7.	Simarpingan	2 Kelompok	60 Anggota
8.	Sipakpahi aek labu	2 Kelompok	60 Anggota
9.	Unte mungkur I	8 Kelompok	2.866 Anggota
10.	Unte mungkur II	6 Kelompok	141 Anggota
11.	Unte mungkur III	6 Kelompo	306 Anggota
12.	Unte mungkur IV	3 Kelompok	93 Anggota
Jumlah		60 Kelompok	7.467 Anggota

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian 2024

Desa Rawa Makmur, dengan luas wilayah 20,05 km² dan jumlah penduduk sekitar 429 jiwa, memiliki lahan yang cukup luas dan kepadatan penduduk yang rendah. Kondisi ini memberikan ruang yang memadai untuk pengembangan pertanian, terutama karena jarak desa yang jauh dari perkotaan dapat mengurangi tekanan urbanisasi dan mempertahankan lahan pertanian. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian, yang terlihat dari hasil panen yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan desa lain. Terdapat beberapa desa yang ada di kecamatan kolang yakni Desa Makarti Nauli, dengan luas 8,08 km² dengan jumlah penduduk sekitar 742 jiwa, Desa Unte Mungkur IV dengan luas desa 13,91 km² dan jumlah penduduk 2.125 jiwa, selanjutnya Desa Unte Mungkur II dengan luas wilayah 14 km² dan jumlah penduduk 1.390 jiwa.

Hasil analisis data berdasarkan sampel yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Rawa Makmur memiliki potensi yang cukup baik dalam pertaniannya karena jumlah penduduk yang kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya, yang dimana juga mayoritas mata pencaharian di desa ini ialah sebagai petani.

Meningkatkan kualitas petani, pemerintah desa telah berupaya membentuk kelompok tani sebagai sarana untuk mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Desa Rawa Makmur memiliki potensi pertanian yang cukup baik, dan merupakan harapan pendapatan paling besar bagi masyarakat. Namun hasil pertanian yang didapatkan oleh kelompok tani seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan hasil panen seringkali hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. harapan terbesar penghasilan masyarakat desa Rawa Makmur ialah dari hasil pertanian.

Kita dapat melihat berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa rawa makmur kecamatan kolang kabupaten tapanuli tengah?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani di desa rawa makmur kecamatan kolang kabupaten tapanuli tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani.
2. Untuk Menjelaskan faktor penghambat dari peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani dan merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian berikut ini ialah :

- 1 Secara Akademik, penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pemahaman penulis mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Hasilnya dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan konsep dalam bidang pengembangan masyarakat, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis kritis mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi kepala desa.
- 2 Secara Praktis, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, dengan memberikan acuan yang lebih efektif dalam merumuskan program pemberdayaan kelompok tani. Hasil penelitian juga dapat memperkuat kapasitas kepala desa dalam mendukung kelompok tani dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

2.1. Peranan

Peranan merujuk pada fungsi atau tugas yang dijalankan oleh seseorang atau sesuatu dalam suatu konteks tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, peranan bisa berarti posisi atau peran individu dalam masyarakat, seperti sebagai anggota keluarga, pekerja, atau warga negara. Dalam konteks yang lebih luas, peranan juga bisa mencakup tanggung jawab dan kontribusi yang diberikan dalam organisasi, kelompok, atau dalam interaksi sosial.

Peranan menurut Soejono Soekanto, (2012) dalam Simanjuntak (2023), mengungkapkan bahwa peranan dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam masyarakat. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan penting untuk ilmu pengetahuan, meskipun keduanya saling terkait. Tidak ada peranan yang ada tanpa kedudukan, dan sebaliknya, kedudukan juga tidak dapat terpisah dari peranan. Selain itu, peranan memiliki dua arti. Setiap individu memiliki berbagai macam peranan yang muncul dari pola interaksi sosialnya. Dengan kata lain, peranan seseorang bisa bervariasi tergantung pada konteks sosial dan hubungan yang dijalininya.

Masyarakat atau organisasi, individu-individu berinteraksi dan menjalankan berbagai fungsi berdasarkan posisi atau status yang mereka pegang. Posisi ini, baik dalam konteks pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan sosial lain mengatur bagaimana individu diharapkan bertindak dan berperilaku. Seperti yang

disampaikan oleh Suhardono (1994), bahwa peranan dapat diartikan sebagai pedoman yang menentukan batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh individu yang memegang suatu posisi tertentu.

Peranan mencakup tiga aspek utama:

1. Peranan melibatkan norma-norma yang terkait dengan posisi individu dalam masyarakat, berfungsi sebagai panduan dalam berinteraksi sosial.
2. Peranan juga merupakan konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam konteks organisasi sosial.
3. Selain itu, peranan dapat dipahami sebagai perilaku yang memiliki signifikansi bagi struktur sosial masyarakat.

Terdapat beberapa peran yang diemban oleh individu tidak hanya mencakup tanggung jawab tertentu, tetapi juga hak, kewajiban, dan harapan dari orang lain di sekitarnya. Dengan adanya peran, individu memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan fungsinya, yang pada gilirannya menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama. Menurut Berry (2003) menjelaskan bahwa peranan adalah harapan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan posisi sosial yang mereka miliki. Harapan ini berasal dari norma-norma sosial, sehingga peranan ditentukan oleh aturan yang ada di masyarakat. Dalam peranan, ada dua jenis harapan: harapan dari orang yang menjalankan peran terhadap masyarakat atau orang lain, dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan seseorang karena tanggung jawab yang datang dari jabatan atau pekerjaan mereka (Simanjuntak, 2023).

Peranan tidak hanya berfungsi sebagai acuan untuk tindakan individu, tetapi juga sebagai pedoman untuk menjaga hubungan yang harmonis dan efektif antar individu dalam masyarakat atau organisasi. Menurut M. Suhardono (1994) dalam Simanjuntak (2023) peranan adalah sekumpulan kriteria yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam posisinya. Berdasarkan teori peranan Suhardono, peranan kepala desa meliputi:

1. Kepala Desa Sebagai Organisator

Kepala desa berfungsi sebagai organisator dengan mengoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Ia berperan sebagai pendorong dan motivator bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan positif, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dan berkontribusi pada perekonomian desa.

2. Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, kepala desa bertugas untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan, seperti menyediakan alat-alat maupun bahan pertanian yang diperlukan untuk kegiatan fisik, Kepala Desa Sebagai

3. Inovator

Peranan kepala desa sebagai inovator adalah menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan nyata dalam pembangunan desa. Ini termasuk kegiatan seperti gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, dan menanam pohon untuk jangka panjang. Kepala desa memegang peranan penting dalam mendekati masyarakat dan mendorong pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.2. Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti menggerakkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan sendiri. Menurut Suparjan & Suyatno (2003) Konsep inti dalam pemberdayaan adalah memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menentukan arah kehidupan dalam komunitas mereka. Menurut Kapita et al. (2017) Pemberdayaan menekankan pentingnya otonomi dalam pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat.

Pemberdayaan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan atau kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Menurut Sulistiyani (2004), secara etimologis, istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung makna kekuatan atau kemampuan. Tujuannya adalah untuk mencapai perubahan sosial yang positif (Nazili, 2015). Sesuai dengan perspektif yang disampaikan oleh Sujono Soekanto terdapat beberapa unsur pemberdayaan yaitu dengan adanya kesadaran sosial, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Pendidikan dan pelatihan dan sumber daya.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Menurut Langi (2015) Kemiskinan dapat diukur melalui indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau tidak layak. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, tempat

tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sementara itu, keterbelakangan dapat dilihat dari rendahnya produktivitas, kualitas sumber daya manusia yang lemah, serta terbatasnya akses terhadap lahan, meskipun ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat tinggi. Pemberdayaan memberikan kekuasaan yang adil kepada semua pihak, sehingga meningkatkan kesadaran politik dan kekuatan kelompok yang lemah. Hal ini membantu mereka memiliki pengaruh lebih besar dalam proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan juga mendorong perubahan sosial, di mana orang-orang yang sebelumnya kurang mampu bersaing akhirnya dapat memiliki kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup mereka, khususnya bagi mereka yang terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki enam tujuan menurut Totok & Poerwoko Soebianto 2019 (Dalam Fitriana, 2020) yaitu :

1. Peningkatan Kelembagaan (*Better Institution*)

Melalui perbaikan tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha.

2. Peningkatan Usaha (*Better Business*)

Dengan adanya peningkatan dalam pendidikan yang mendorong semangat belajar, aksesibilitas bisnis, serta perbaikan kelembagaan, diharapkan akan terjadi perbaikan dalam usaha yang dijalankan.

3. Peningkatan Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan dalam bisnis yang dijalankan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat.

4. Peningkatan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat berdampak pada perbaikan lingkungan, baik fisik maupun sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali terkait dengan kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Peningkatan Kualitas Hidup (*Better Living*)

Dengan meningkatnya pendapatan dan kondisi lingkungan, diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup setiap keluarga dan masyarakat.

6. Peningkatan Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik, didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

2.3. Pemberdayaan Kelompok Tani

Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang bergabung untuk bekerja sama dalam mengelola usaha pertanian. Menurut Mulyana (2005) menyatakan bahwa kelompok pada dasarnya merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, dengan pola interaksi yang relatif stabil serta memiliki struktur tertentu. Menurut Mardikanto & Soebiato (2012), terdapat beragam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam proses pengembangan yang dinamis, di mana pemerintah memegang peran penting dalam pelaksanaannya. Mereka saling membantu dalam hal berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman untuk meningkatkan hasil pertanian. Tujuan utama kelompok tani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui

kerjasama dan pemanfaatan potensi yang ada di antara mereka.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat ialah dengan membentuk kelompok tani. Menurut Mardikanto (2003), menyampaikan bahwa kelompok tani merupakan suatu kesatuan atau komunitas yang hidup bersama dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Kelompok petani umumnya dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kondisi yang ada di lingkungan mereka.

Kebijakan pertanian merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, mencakup tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Tujuan utama kebijakan pertanian di Indonesia adalah untuk meningkatkan sektor pertanian agar lebih produktif, meningkatkan hasil dan efisiensi produksi, yang pada gilirannya berdampak positif pada taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Simamora et al., 2021). Dengan membentuk kelompok petani yang memiliki pemahaman yang baik, pelatihan yang diberikan dapat membantu petani menjadi lebih mandiri, mengembangkan inovasi, dan menganalisis usaha tani mereka. Hal ini bertujuan agar petani dan keluarganya dapat meningkatkan pendapatan serta mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Meningkatkan efisiensi dalam pembagian dan pengawasan penggunaan air irigasi oleh petani.

Keanggotaan dalam kelompok tani memberikan banyak keuntungan, seperti akses yang lebih mudah terhadap informasi dan teknologi pertanian terbaru, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan usaha tani, serta peluang untuk mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah atau lembaga lain. Menurut Wahyuni (2003), berpendapat bahwa kelompok tani berperan penting sebagai

sarana komunikasi bagi petani. Ini berarti bahwa kelompok tani bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga platform di mana petani dapat berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan satu sama lain. Dalam konteks pertanian, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha tani (Nippi, 2019).

Tujuan utama dari pembentukan kelompok tani Apabila dilihat Secara umum, adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta pendapatan anggota kelompok tani melalui kerjasama yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan atau sumber daya. Menurut Soekanto (1998) mendefinisikan bahwa petani sebagai individu yang mengolah lahan untuk bercocok tanam atau memelihara ternak dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemberdayaan kelompok tani melalui usulan dari pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa yang lebih baik (*Good Local Governance*). Menurut Fauziah & Adi (2015) Dengan pemberdayaan ini, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok tani, dapat diatasi, seperti kurangnya kemandirian petani dalam berwirausaha, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan lahan pertanian, serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam berwirausaha.

Strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, terutama untuk kelompok tani, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat potensi yang sudah ada, memberikan perlindungan kepada kelompok tani. Upaya ini dilakukan dengan membentuk dan mengubah perilaku masyarakat melalui pengembangan berbagai potensi yang dimiliki (Liwu & Sasmito, 2019).

Peran pemerintah desa sangatlah berpengaruh dalam perkembangan ekonomi desa, sesuai dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang Undang Desa ini memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok tani. Dalam pemberdayaan kelompok tani, peraturan ini memberikan pedoman tentang bagaimana pemerintah desa dapat memperdayakan kelompok tani melalui program, termasuk pelatihan , akses teknologi dan bantuan modal. Dalam UU No 6 Tahun 2014 ini, pemerintah desa diharapkan bisa merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal, termasuk di sektor pertanian.

Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola potensi desa secara mandiri, yang bisa mencakup pemberdayaan kelompok tani melalui pelatihan, pemberian modal, dan peningkatan kapasitas. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, dengan adanya undang undang ini upaya pemberdayaan kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan dalam berbagai upaya yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani dalam mengelola usaha pertanian.
2. Mendorong partisipasi aktif petani dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kesejahteraan enaggota kelompok tani melalui peningkatan produktifitas dan akses pasar .
4. Mengembangkan sistem sarana dan prasarana pemasaran hasil
5. pertanian Menyediakan fasilitas pembiayaan dan permodalan.

2.4. Pemerintahan Desa

Istilah "pemerintah" berasal dari kata "perintah". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pemerintah" merujuk pada lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan resmi di suatu negara. Istilah ini juga mencerminkan sistem yang digunakan untuk mendorong perubahan positif yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Secara umum, "pemerintahan" merujuk pada proses atau cara yang diterapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai inisiatif di bidang ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah nasional demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Dwipayana & Eko (2003) pemerintahan desa yang menjunjung nilai-nilai demokratis seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas akan menjadi semakin kuat, sah, serta mampu menjalankan fungsinya secara efektif jika dibangun atas dasar kesetaraan, keseimbangan, dan saling percaya antar unsur pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan transformasi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam hal kepemimpinan dan peningkatan kinerja birokrasi yang berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Desa adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengatur masyarakat di area tertentu, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan pembangunan desa.

Tujuan utama dari pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Amil et al. (2019) Desa dipahami sebagai sebuah komunitas hukum yang memiliki struktur asli yang didasarkan pada hak-hak yang berasal dari asal-usulnya, yang bersifat khas. Konsep dasar mengenai pemerintahan desa meliputi keberagaman, partisipasi, otonomi yang bersifat asli, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki batas wilayah yang jelas dan kekuasaan hukum, serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Selain itu, desa juga dapat dipandang sebagai hasil interaksi antara kelompok masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Desa memerlukan suatu pemerintahan untuk mengelola dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, pemerintahan desa berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, pemerintah desa diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam mengelola urusan masyarakat, mempromosikan partisipasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Soekanto (2006) memaparkan beberapa karakteristik sosial yang melekat pada masyarakat desa, antara lain:

1. Ikatan kekeluargaan yang kuat, Warga desa umumnya memiliki hubungan kekerabatan yang erat, seringkali karena berasal dari satu garis keturunan. Akibatnya, hubungan keluarga dan persaudaraan sangat kental dalam suatu wilayah pedesaan.
2. Hubungan sosial yang erat, Kehidupan masyarakat desa dicirikan oleh ikatan kekeluargaan yang kuat. Selain itu, interaksi antar warga bersifat tatap muka

(*face to face group*) sehingga mereka saling mengenal satu sama lain.

3. Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan.
4. Semangat gotong royong yang tinggi, Nilai-nilai gotong royong masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa

Pemerintah desa dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih berkembang dan maju jika pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Local Governance*). Ini penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama dalam era reformasi saat ini, di mana peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan menuju kemajuan yang lebih baik (Fauziah & Adi, 2015).

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani ialah :

1. Peningkatan Produksi Pertanian: Pemerintah desa diharapkan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memberikan akses terhadap teknologi pertanian, benih unggul, dan pupuk yang berkualitas.
2. Pelatihan dan Penyuluhan: Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan kepada petani mengenai teknik pertanian yang baik, pengelolaan lahan,.

3. **Pengembangan Infrastruktur Pertanian:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian, seperti irigasi, jalan akses ke lahan pertanian, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertanian, termasuk menjaga kelestarian lahan dan sumber daya air.
5. **Pemberian Bantuan dan Subsidi:** Menyediakan bantuan dan subsidi bagi petani, baik dalam bentuk modal, alat pertanian, maupun fasilitas lain yang dapat membantu meningkatkan produktivitas.

Pelaksana kebijakan di tingkat desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa, kepala desa, dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) menjadi kunci dalam menjalankan fungsi ini. Mereka bekerja secara bersama-sama untuk merancang dan melaksanakan rencana pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran sebagai mediator atau perantara antara masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Mereka bertindak sebagai suara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, mereka juga bertugas untuk menyampaikan informasi, kebijakan, dan program-program pembangunan dari pihak yang berwenang kepada masyarakat desa (Andriyani et al., 2024).

Pemerintah desa harus memiliki keterbukaan dalam setiap aspek kepemimpinannya. Menurut Junaidi & Paribrata (2015) Keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat memahami dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kemajuan desa. Dengan adanya keterbukaan, informasi mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran desa dapat diakses oleh semua pihak, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Keterbukaan informasi seharusnya tidak dianggap sebagai hal yang perlu ditakuti, karena dengan adanya keterbukaan informasi, berbagai hal positif dapat terwujud dan akan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang baik, di antaranya:

1. Dengan dibukanya akses masyarakat terhadap informasi publik, hal ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa.
2. Keterbukaan informasi dalam pemerintahan desa dapat menghilangkan rasa curiga, prasangka, atau rumor negatif yang berkembang di kalangan masyarakat tentang pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Keterbukaan informasi juga melindungi hak masyarakat atas informasi yang benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Keterbukaan informasi dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan informasi. Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi, termasuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi, biasanya terjadi ketika informasi publik disembunyikan dan hanya diketahui oleh sekelompok orang saja.

Keterbukaan informasi publik akan membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat memberikan kritik, ide, dan masukan yang konstruktif, yang pada gilirannya akan mempererat hubungan antara Pemerintah Desa dan masyarakat serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2.5. Peraturan Bupati Tapteng No.1 Tahun 2016

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 1 Tahun 2016 mencakup aspek pemberdayaan petani sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berikut aspek dalam pemberdayaan kelompok tani berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli tengah No. 1 Tahun 2016 yakni :

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan

Pemberdayaan petani bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan Pendidikan. Hal ini mencakup Teknik pertanian yang lebih baik, pengelolaan sumber daya, dan penggunaan teknologi pertanian modern.

2. Akses terhadap sumber daya

Melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya penting seperti modal, lahan, dan input pertanian (Benih, Pupuk, Alat). Maka dengan akses yang lebih baik, akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

3. Pengembangan koperasi dan kelompok tani

Mendorong pembentukan koperasi dan kelompok tani dapat membantu petani untuk berkolaborasi dalam hal pemasaran hasil pertanian, pembelian Bersama dan berbagi pengetahuan.

4. Subtainabilitas pertanian

Pemberdayaan petani harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Peraturan ini memiliki tujuan agar petani di Tapanuli Tengah dapat diberdayakan secara efektif, sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan petani merupakan langkah penting dalam mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Peranan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di desa Tumaratas kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, oleh Gleydis Susanti Oroh 2014	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Tumaratas memiliki peranan yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian. Peran tersebut direalisasikan melalui pembinaan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk bergotong royong dalam kegiatan pertanian, seperti membangun tempat penampungan air. Selain itu, pemerintah desa juga aktif dalam pelayanan dan pengembangan masyarakat dengan berkontribusi dalam berbagai tahapan aktivitas usaha tani, mulai dari pengolahan tanah hingga proses panen padi, baik di sawah maupun ladang. Keberhasilan pemberdayaan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain kekuasaan pemerintah desa, sistem pendidikan yang maju, keterbukaan sistem bagi seluruh lapisan masyarakat, orientasi untuk maju, serta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti	Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu memiliki Fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di era otonomi daerah ditinjau dari pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan pada masyarakat dan pengembangan pada masyarakat sedangkan penelitian saat ini focus pada "Peranan Kepala Desa" terhadap pemberdayaan masyarakat dalam kelompok tani.

			kelompok kepentingan dan kualitas sumber daya aparatur desa yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dapat berjalan optimal.	
2.	Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung Kecamatan Godean kabupaten Sleman, oleh Sigit Suwardianto 2015	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Kepala desa di Desa Tualene telah berupaya menjalankan perannya dalam pemberdayaan kelompok tani, baik sebagai fasilitator, mediator, maupun motivator. Upaya ini terlihat dari pemberian bantuan pupuk, penyuluhan, arahan, dan komunikasi yang dibangun dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, masih ada beberapa catatan terkait penyediaan fasilitas yang belum menyeluruh dan beberapa harapan masyarakat yang belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan kelompok tani secara lebih komprehensif agar pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.	Perbedaan anatar penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian terdahulu memiliki locus penelitian di desa sidoagung kecamatan godean kabupaten sleman sedangkan penelitian sekarang melakuakn locus penelitian di desa rawa mkamur kecamatan kolang kabupaten tapanuli tengah.
3.	Peranan kelompok tani terhadap peingkatan pendapatan petani padi sawah di keluarahn hutabalang kecamatan badiri	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah peranan kelompok tani terhadap peningkatan pendapatan petani padi sawah di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah cukup signifikan. Kelompok tani berperan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan	Perbedaan anatar penelitian terdahulu dengan penelitia saat ini adalah pada subjek dan lokasi penelitian. Dimana penelitian menjadikan kelompok tani subjek utama dan lokasi penelitian di

	kabupaten tapanuli, oleh lucky Ronaldo Gulo 2022		unit produksi bagi para anggotanya. Peran kelompok tani ini terbukti memiliki hubungan positif dengan tingkat pendapatan petani anggota. Petani yang aktif dalam kelompok tani cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak aktif atau bukan anggota kelompok tani. Hal ini dimungkinkan karena adanya akses yang lebih baik terhadap informasi, teknologi, dan input pertanian melalui kelompok tani.	kelurahan hutabalang kecamatan badiri kabupaten tapanuli tengah sedangkan penelitian sekarang memiliki subjek penelitian yaitu kepala desa dan lokasi penelitian di desa rawa amkmur kecamatan kolang kabupaten tapanuli tengah.
4.	Peranan pemerintahan daerah dalam pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen padi di kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli oleh Soetarto et al. (2020)	Kualitatif	Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan petani padi di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Pemerintah berperan aktif membentuk kelompok tani, dibantu oleh Dinas Pertanian dan Kelautan serta Penyuluh Lapangan. Fokus utama program ini adalah masyarakat petani berpenghasilan rendah. Untuk meningkatkan hasil panen, pemerintah menyediakan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk Jetor, pompa air, pupuk bersubsidi, benih padi, dan mesin perontok. Meskipun program ini mendapat dukungan positif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti berkurangnya lahan pertanian, masalah kepemilikan lahan, dan kendala irigasi. Kendati	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian terdahulu memiliki fokus pada petani padi sedangkan penelitian sekarang melakukan fokus pada kelompok tani. Selanjutnya penelitian terdahulu memilih objek penelitian di kelurahan Mabar Hilir, kecamatan Medan Deli sedangkam penelitian sekarang memiliki onjek penelitian di desa rawa Makmur kecamatan kolang kabupaten tapanuli tengah.

			demikian, dukungan kuat dari Dinas Pertanian dan Kelautan dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian menjadi faktor pendorong utama keberhasilan program pemberdayaan petani padi di Kelurahan Mabar Hilir	
5	Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, oleh Nelcy Arianse Uly Riwu dkk 2022	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Kepala desa telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan kelompok tani, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Peran kepala desa dilihat dari tiga aspek utama yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. penelitian ini juga mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas yang lebih komprehensif dan realisasi program-program yang telah direncanakan. Beberapa petani masih merasa bahwa tidak semua aspek bantuan yang dijanjikan telah terealisasi sepenuhnya.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terlihat pada lokasi penelitian yakni penelitian terdahulu focus penelitian nya terletak di desa tualene kecamatan biboki utara kabupaten timor tengah utara sedangkan penelitian sekarang lokasi penelitian di desa rawa Makmur kecamatan kolang

Sumber: Disusun Oleh Penulis

Penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Oroh (2014) dan Suwardianto (2015), lebih menekankan pada peranan pemerintah desa dan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian secara umum, serta di lokasi yang

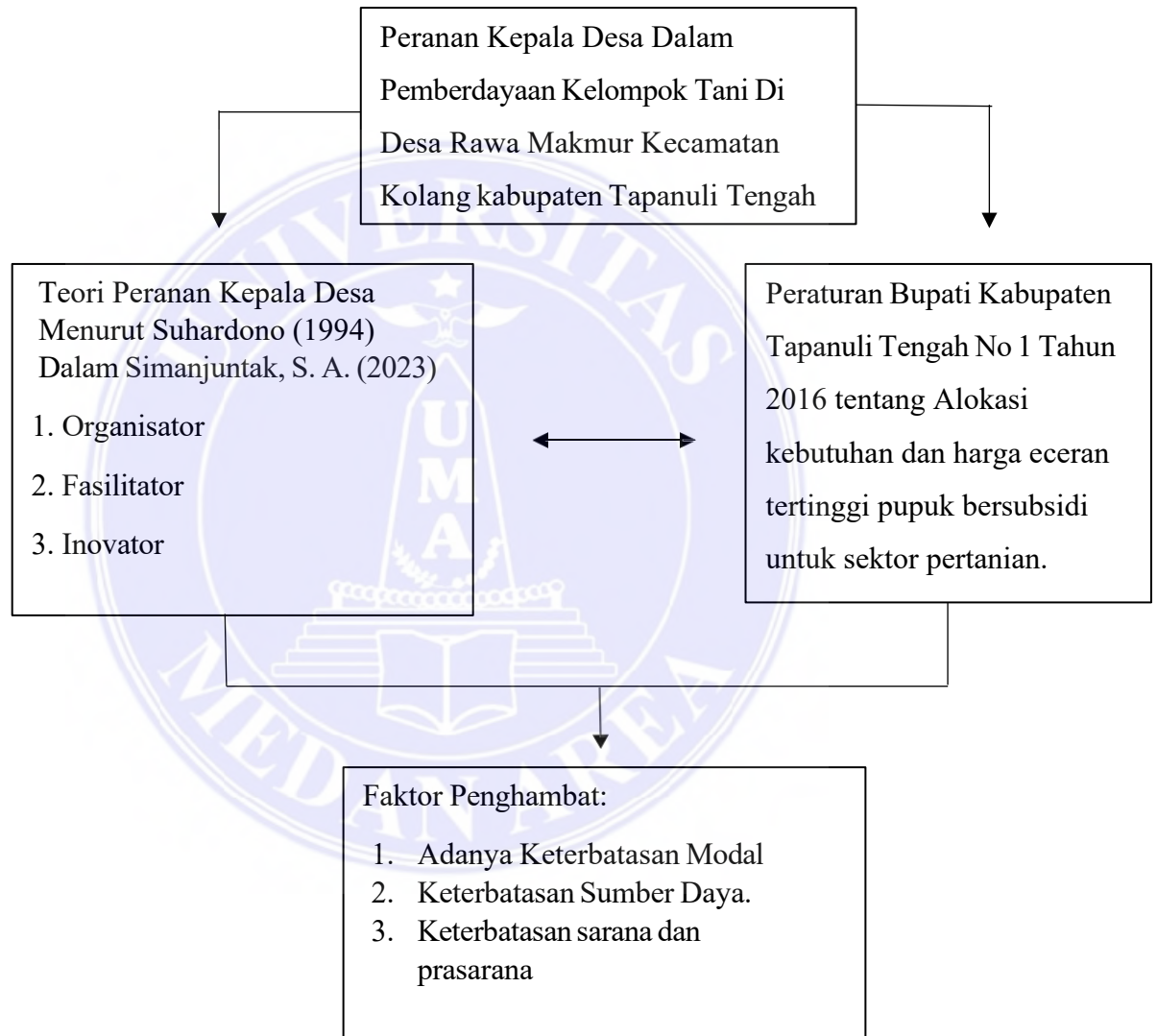
berbeda. Sementara itu, penelitian ini akan lebih spesifik meneliti peranan kepala desa dalam konteks pemberdayaan kelompok tani di Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai dinamika interaksi antara kepala desa dan kelompok tani, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, yang belum sepenuhnya terungkap dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang peran kepala desa dalam konteks pemberdayaan kelompok tani di daerah yang lebih spesifik.

2.7. Kerangka Berpikir

Desa Rawa Makmur memiliki mayoritas sumber mata pencaharian masyarakat adalah dari sektor pertanian. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pertanian masyarakat dan untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kepala desa telah berupaya membentuk kelompok tani. Hingga saat ini terdiri dari 5 kelompok tani dengan anggota 114 jiwa.

Kelompok tani belum berjalan dengan baik dalam pemberdayaan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan mereka. Kendala yang dimiliki berupa keterbatasan modal, kurangnya sumber daya dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan keterampilan bertani. Sehingga dengan terjadinya hambatan maka akan sangat dibutuhkannya partisipasi dari kepala desa Rawa Makmur dalam pemberdayaan kelompok tani. Maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemberdayaan kelompok tani dilakukanlah penelitian terkait “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah”

Berikut merupakan kerangka berpikir yang dilakukan peneliti, sebagai konsep atau teori untuk mengukur penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Suhardono (1994), konsep teori peran mengemukakan bahwa kepala desa berfungsi sebagai seorang organisator, fasilitator, dan innovator.



Gambar 1. Kerangka berpikir

Sumber : Diolah peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul "Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Rawa Makmur kecamatan Kolang" dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan objek serta fenomena yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan naratif, yang memungkinkan untuk memahami perspektif, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu situasi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kompleksitas suatu fenomena secara lebih mendalam, dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang cenderung lebih terstruktur. Penelitian kualitatif memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku dan pandangan individu, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan bermakna.

Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan tidak. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu,

melainkan hanya untuk menggambarkan kondisi atau gejala dari suatu variabel sebagaimana adanya.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat aktif dan terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Maka peneliti akan melakukan Interaksi langsung pada masyarakat yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan nuansa dari pengalaman atau pandangan subjek. Melalui wawancara, diskusi, atau observasi, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang tidak hanya berdasarkan apa yang diucapkan, tetapi juga bagaimana subjek berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial mereka.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penyusunan penelitian ini melakukan peneliti di Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.



Gambar 2. Lokasi Desa Rawa Makmur

Sumber : google Maps 2025

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian tersebut berlangsung mulai bulan November 2024 hingga bulan September 2025. Untuk Informasi lebih lengkap perhatikan tabel dibawah.

Tabel 4.Susunan Waktu penelitian

No	Uraian Penelitian	2024		2025							
		Nov 2024	Des 2024	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Juli 2025	Agu 2025	Sep 2025
1.	Penyusunan proposal										
2.	Seminar Proposal										
3.	Perbaikan proposal										
4.	Pelaksanaan penelitian										
5.	Penyusunan skripsi										
6.	Seminar Hasil										
7.	Revisi Skripsi										
8.	Sidang Meja Hijau										

Sumber : Disusun oleh peneliti

3.3. Informan Penelitian

Menentukan informan penelitian ini, digunakan Sampel penelitian menurut Creswell, (2014) dalam Subhaktiyasa, P. G. (2024). menjelaskan bahwa sampel adalah subset dari populasi yang dipilih menggunakan teknik tertentu untuk memastikan representativitasnya Informan Penelitian. Menurut Creswell dalam Setiawan, N. M. (2023) dalam penelitian kualitatif, peneliti menentukan objek atau peserta yang akan diteliti melalui metode pemilihan yang disengaja (purposeful sampling). Metode ini melibatkan seleksi terhadap individu atau

lokasi yang paling sesuai untuk membantu pemahaman tentang suatu fenomena.

Purposive sampling merupakan suatu strategi dalam penelitian kualitatif di mana peneliti secara sengaja memilih individu dan lokasi yang dianggap dapat memberikan wawasan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Terdapat beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti dalam penelitian berikut yaitu :

1. Informan kunci yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan informasi penting yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Informan utama yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.
3. Informan tambahan yaitu yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti

Maka berikut merupakan informan yang digunakan peneliti dalam menemukan informasi sebagai pendukung penelitian yakni :

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jenis Informan	Jumlah
1.	Budiman Ferdinan tani	Ketua Kelompok	Informan Kunci	1 Orang
2.	Pinonta Sinaga	Kepala Desa	Informan Utama	1 Orang
3.	Artina simatupang Nur latifah Preddi Marbun	Masyarakat Desa Rawa Makmur	Informan Tambahan	3 Orang

Sumber : Disusun Oleh Peneliti

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2016:253), posisi dan peran peneliti sangat berpengaruh dalam menjelaskan berbagai persoalan yang berpotensi timbul selama proses pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beragam metode pengumpulan data.

3.4.1. Observasi

Observasi menurut Creswell (2016) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti.. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendetail tentang perilaku, interaksi, dan konteks lingkungan dari subjek yang diteliti. menyampaikan bahwa tujuan dari observasi tidak hanya untuk memahami perilaku atau peristiwa tertentu, tetapi observasi yang bersifat ilmiah dilakukan dengan tujuan yang lebih mendalam, yaitu untuk menghasilkan pengetahuan yang memenuhi kriteria penelitian tanpa memerlukan banyak biaya atau tenaga ahli. Selanjutnya, dilakukan pemetaan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai fokus penelitian. Setelah itu, peneliti akan mengelompokkan individu atau kelompok yang akan dijadikan objek observasi dalam penelitian tersebut.

Peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Rawa Makmur, terutama terhadap aktivitas kepala desa, kelompok tani, serta dinamika masyarakat. Melalui observasi, peneliti bisa mencatat kegiatan musyawarah, pembagian bantuan pertanian, hingga kehadiran kepala desa dalam mendampingi kelompok

3.4.2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pengalaman dari responden mengenai topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur, semi- terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada sejauh mana kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci, utama, dan tambahan (Ketua kelompok tani, kepala desa, dan masyarakat). Melalui wawancara, diperoleh informasi mendalam tentang kebijakan, hambatan, serta pengalaman kelompok tani dalam proses pemberdayaan.

3.4.3. Dokumentasi

ketika Anda menyebut "dokumentasi," ini merujuk pada analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Anda akan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung dan memperkaya pemahaman Anda tentang peranan kepala desa dan faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani di Desa Rawa Makmur.

Peneliti mengumpulkan dokumen resmi seperti data kelompok tani, arsip desa, hingga peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 1 Tahun 2016 yang menjadi acuan pemberdayaan petani. Dokumentasi ini memperkuat hasil observasi dan wawancara. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan foto hasil dari observasi hingga wawancara sebagai dokumentasi penelitian.

3.4.4. Materi Audio dan Visual

Kategori terakhir dari data kualitatif mencakup bahan audio dan visual (qualitative audio and visual materials), yang dapat berupa foto, karya seni, rekaman video, maupun berbagai bentuk suara atau bunyi.

Peneliti menggunakan foto, rekaman, atau bahan visual lainnya untuk memperkaya data penelitian. Misalnya dokumentasi kegiatan kelompok tani atau aktivitas pemberdayaan yang difasilitasi kepala desa .

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Creswell (2016) Analisis data dalam penelitian kualitatif akan dilakukan secara bersamaan dengan aspek-aspek lain dari pengembangan penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data dan penulisan hasil temuan.

1. Pengelompokan kategorial.

Mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis melibatkan beberapa langkah, termasuk transkripsi wawancara, pemindaian materi, pengetikan data lapangan, serta memilah dan mengorganisir data ke dalam berbagai kategori.

2. Membaca dan Mencatat Keseluruhan Data.

Membangun pemahaman umum tentang informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan bertujuan untuk Mendapatkan gambaran umum, kesan menyeluruh dari keseluruhan data. Peneliti membaca semua transkrip, catatan, dan dokumen secara cepat tanpa melakukan analisis mendalam. Ini membantu peneliti meresapi konteks dan mulai mengidentifikasi ide-ide atau pola-pola awal yang menonjol.

3. Proses Pengkodean.

Membaca data baris demi baris atau paragraf demi paragraf dan memberikan label deskriptif pada setiap segmen yang relevan. Kode-kode ini bersifat terbuka dan muncul langsung dari data. Mengelompokkan kode- kode awal yang serupa atau terkait menjadi kategori yang lebih luas. Pada tahap ini, peneliti mulai mencari hubungan, dimensi, dan properti antar kategori, dengan tujuan Mengorganisir data menjadi segmen-segmen bermakna dan memberikan label (kode) pada segmen tersebut. Ini adalah tahap sentral dalam analisis kualitatif.

4. Deskripsi Hasil dari Pengumpulan Data.

Menyajikan temuan secara naratif dan konseptual. Menulis deskripsi rinci tentang konteks, partisipan, dan fenomena yang diteliti. Deskripsi ini seringkali diperkaya dengan kutipan langsung (*verbatim quotes*) dari data untuk memberikan bukti empiris dan "suara" kepada partisipan.

5. Menyusun Data.

Menyajikan temuan secara visual atau tekstual agar mudah dipahami pembaca. Temuan dapat direpresentasikan dalam berbagai format seperti narasi deskripsi, table maupun diagram untuk menggambarkan alur atau struktur fenomena.

6. Interpretasi Data.

Merupakan langkah terakhir dalam analisis data pada penelitian kualitatif. Interpretasi dibuat dari hasil data yang sudah dikumpulkan, peneliti dapat menggunakan teori atau konsep yang sesuai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan kedua rumusan masalah pada penelitian berikut yaitu :

1. Peranan kepala desa Rawa Makmur, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam membantu para petani agar bisa lebih maju dan sejahtera. Sebagai organisator peranan kepala desa cukup baik yaitu berupaya dalam mendatangkan penyuluhan, peranan kepala desa sebagai fasilitator cukup baik meskipun belum tercapai maksimal termasuk dalam penyediaan pupuk dan bibit namun pupuk dan bibit tersebut belum mencukupi kebutuhan tani, dan peranan kepala desa sebagai inovator juga sudah cukup baik yang dimana kepala desa melakukan adanya kegiatan rutin gotong royong hingga pengadaan sumber air untuk kelompok tani.
2. Pemberdayaan kelompok tani di desa rawa makmur kecamatan kolang menunjukkan bahwa proses pemberdayaan kelompok tani masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Hambatan utama yang ditemui adalah keterbatasan modal, yang membuat petani sulit untuk mengembangkan usaha taninya secara optimal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah juga menjadi kendala, karena sebagian besar petani belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pertanian secara modern.

5.2. Saran

Hambatan yang ada berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait pemberdayaan kelompok tani didesa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah ialah :

1. Kepala Desa dapat membangun koordinasi yang lebih erat dengan dinas pertanian, penyuluh pertanian, dan organisasi terkait guna mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan rutin dan bantuan alat. Dengan adanya koordinasi erat dengan dinas pertanian maka akan dilakukan pelatihan secara rutin sehingga masyarakat yang dari latarbelakang pendidikan rendah sedikit-demi sedikit dapat memahami sistem pertanian modern maupun peralatan modern..
2. Kepala Desa dapat membentuk koperasi tani dengan adanya koperasi, petani bisa mengakses pinjaman dengan bunga rendah dan membeli kebutuhan pertanian yang dibutuhkan untuk menekan biaya, dan untuk
3. Peningkatkan keterampilan masyarakat maka dapat Mengadakan pelatihan dengan pendekatan sederhana dan berbasis praktik langsung agar lebih mudah dipahami petani. Selanjutnya juga pemerintah desa dapat membantu masyarakat menjalin kerja sama dengan pasar atau usaha lokal agar hasil pertanian masyarakat memiliki disitibusi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Berry, D. (2003). *Pokok - Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Belajar
- Dwipayana, A. A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Fitriana, N. (2020). *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Junaidi, M., & Paribrata, A. I. (2015). *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa*. Jawa Timur: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- Koentjaraningrat.(1983). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardikanto, T. (2003). *Redefinisi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Penerbit Puspa.
- Mardikanto, Totok, & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suparjan, & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan masyarakat: dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Ulfatin, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Banyumedia Publishing.

JURNAL DAN SKRIPSI

Amil, A., Maniza, L. H., & Wahyudi, R. (2019). Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 167–181.

Andriyani, L., Batubara, B. M., & Lubis, K. (2024). Peranan Pemerintah Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Anak berbasis Rumah Belajar Desa Ononamolo Talafu Kabupaten Nias. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 6(2), 112–119.

Fauziah, H., & Adi, A. S. (2015). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani Agribisnis Desa Medang Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(3), 1210–1227.

Gulo, L. R. (2022). *Peranan Kelompok Tani terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah*. Universitas Medan Area.

Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–14.

Lawolo, L., Sinaga, R. S., & Lubis, K. (2023). PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PADA KELURAHAN KENANGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(2).

Lahada, G. (2020). Kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di desa Malei Lage kecamatan Lage kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 1–10.

Langi, J. E. (2015). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan) 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1–11.

Liwu, A. S., & Sasmito, C. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 228–233.

Nippi, A. T. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok *Meraja Journal*, 2(1), 35–47.

- Oroh, G. S. (2014). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten.
- Riwu, N. A. U. (2022). *Peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa taulene kecamatan biboki utara kabupaten timor tengah utara*. Universitas Timor.
- Setiawan, N. M. (2023). Insti (John W. Creswell, 2016) (John W. Creswell, 2016)tusionalisasi Partai Golkar Banten Dalam Infusi Nilai dan Reifikasi di Masa Kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Agung Tirtayasa).
- Simamora, B., Lubis, K., & Arini, H. (2021). Analisis asumsi-asumsi pada program food estate di Papua. *PERSPEKTIF*, 10(2), 293–300.
- Simanjuntak, S. A. (2023). *Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sabungannihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara*. Universitas Medan Area.
- Soekartawi, S. (2007). E-Agribisnis: Teori dan Aplikasinya. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 19–25.
- Soetarto, S., Simbolon, B. R., & Zebua, S. (2020). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi. *Jurnal Governance Opinion*, 4(2), 150–169.
- Suwardianto, S. (2015). Peranan Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 171.
- Tumanggor, H. (2021). *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasudutan*. Universitas Medan Area.
- Wahyuni, S. (2003). Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal Litbang Pertanian*, 22(1), 1–8.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang - Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang desa

SUMBER LAINNYA

<https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/melalui-imt-gt-pemprov-sumut-canangkan-petani-milenial>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Unte_Mungkur_II,_Kolang,_Tapanuli_Tengah

https://id.wikipedia.org/wiki/Unte_Mungkur_IV,_Kolang,_Tapanuli_Tengah

https://id.wikipedia.org/wiki/Makarti_Nauli,_Kolang,_Tapanuli_Tengah

https://id.wikipedia.org/wiki/Rawa_Makmur,_Kolang,_Tapanuli_Tengah



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DIDESA RAWA MAKMUR KECAMATAN KOLANGKABUPATEN TAPANULI TENGAH

Berikut merupakan pertanyaan yang digunakan peneliti sebagai pedoman wawancara. Peneliti hanya mennetukan pedomana wawancara secara garis besar dan akan dikembangkan saat wawancara berlangsung.

1. Kepala Desa Rawa Makmur

Pertanyaan penelitian :

1. Apa peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani?
2. Bagaimana upaya kepala desa dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani didesa rawa makmur?
3. Sejauh mana kepala desa melibatkan anggota kelompok tani dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemberdayaan kelompok tani desa rawa makmur?
4. Apa saja ide-ide yang diberikan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani didesa rawa makmur?
5. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani desa rawa makmur?

2. Ketua kelompok tani

Pertanyaan penelitian :

1. Apa peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani?
2. Bagaimana upaya kepala desa dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani didesa rawa makmur?
3. Sejauh mana kepala desa melibatkan anggota kelompok tani dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan

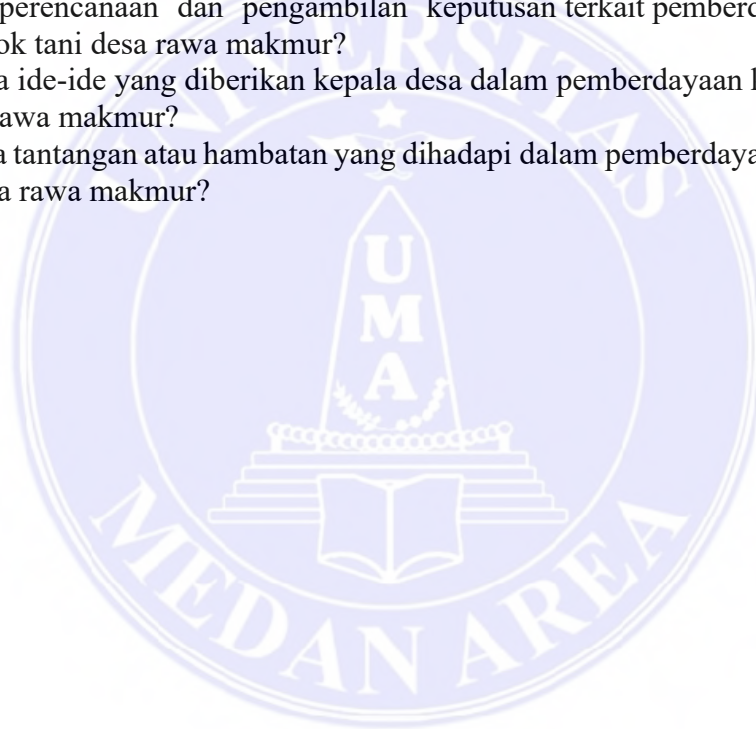
terkait pemberdayaan kelompok tani desa rawa makmur?

4. Apa saja ide-ide yang diberikan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani didesa rawa makmur?
5. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani desa rawa makmur?

3. Masyarakat

Pertanyaan penelitian :

1. Apa peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani?
2. Bagaimana upaya kepala desa dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani didesa rawa makmur?
3. Sejauh mana kepala desa melibatkan anggota kelompok tani dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemberdayaan kelompok tani desa rawa makmur?
4. Apa saja ide-ide yang diberikan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani didesa rawa makmur?
5. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani desa rawa makmur?



Lampiran 2 : Dokumentasi penelitian

1. Dokumentasi dengan kepala desa Rawa Makmur



2. Dokumentasi dengan ketua kelompok tani desa Rawa Makmur



3. Dokumentasi dengan masyarakat Desa rawa makmur



4. Dokumentasi lahan Kelompok Tani Desa Rawa Makmur



“Gambar lahan kelompok Tani”



“Jalan menuju lahan kelompok tani”

Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KECAMATAN : KOLANG
DESA : RAWA MAKMUR
KODE DESA : 12.01.06.2012

Rawa Makmur, 12 Februari 2025

Nomor : 12 /RM/II/2025
Lamp : -
Hal : Surat Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area
Di,

Tempat

Dengan hormat,

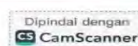
Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area No: 190/FIS.2/01.10/1/2025 tentang Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset dari Maha Siswa Universitas Medan Area atas nama

Nama : Yusnita Marbun
NIM : 218520021
Program Studi : Administrasi Publik

Benar telah di izinkan melaksanakan Penelitian/Riset di Desa Rawa Makmur dengan judul :

"PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DIDESA RAWA MAKMUR KECAMATAN KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH"

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih



Surat keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN KOLANG
DESA RAWA MAKMUR
KODE DESA : 12.01.06.2012

SURAT KETERANGAN

Nomor : **15/RM/V/2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PINONTA SINAGA**

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusnita Marbun

NIM : 218520021

Jurusan : Administrasi Publik

Menerangkan nama mahasiswa Universitas Medan Area di atas Telah Melaksanakan Penelitian sesuai dengan Surat Permohonan dari UMA No : 190/FIS.2/01.10/1/2025 Terhitung Mulai Tanggal 12 Februari 2025 - 10 Maret 2025 dengan Judul Skripsi "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah".

Demikian Surat keterangan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Rawa Makmur, 17 Maret 2025

